

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DALAM MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA KEPUHARJO
(Studi di Kepuharjo Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik**



Oleh:

**FREDERINGKO UMBU KATANGA YANI
NIM.2017210190**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2023**

RINGKASAN

Salah satu organisasi yang bertanggung jawab memantau jalannya pemerintahan tingkat pedesaan adalah Badan Permusyawaratan Desa. Keterlibatan BPD turut serta memandu pelaksanaan pemerintahan desa antara lain mengakomodasi dan mengarahkan tujuan masyarakat. Kualitatif *Method* dipilih dan digunakan dalam *research* ini dengan pendekatan triangulasi, serta dianalisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyeluruh. Berdasarkan temuan penelitian, Raperdes harus dikaji ulang bersama dengan masukan dari pemerintah desa, yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan pemerintah desa. masyarakat Desa Kepuharjo untuk dikaji kemudian. Terakhir, peninjauan sebaiknya dilakukan secara maksimal pada pembahasan peraturan desa Kepuharjom, sebelum disahkan dan diberlakukan. Selain itu, badan permusyawaratan desa menyaring aspirasi masyarakat dengan mengikuti Musdes atau Musdus. Pihaknya juga rutin melakukan koordinasi yakni setiap tiga bulan sekali dengan masyarakat yang diwakili oleh Rw/Rt setempat, yang mana pihaknya mengkomunikasikan tantangan atau permasalahan yang ada di setiap daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan program, bahkan kebijakan untuk menghadapi permasalahan yang ada saat ini. . Untuk memastikan bahwa segala keputusan yang diambil oleh pemerintah Desa Kepuharjo diambil berdasarkan kesepakatan bersama, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepuharjo tidak hanya mengawasi kinerja pelayanan pemerintah desa tetapi serta prospek pembangunan dan laporan keuangan desa. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Fungsi BPD di Desa Kepuharjo, dimana faktor pendukungnya antara lain motivasi kerja BPD yang tinggi, serta dukungan masyarakat yang kuat dan peraturan yang mengikat merupakan faktor yang menunjang keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya. tugas dan fungsinya, sedangkan yang menjadi kendalanya adalah pada struktur sarana juga prasarana, serta peran serta masyarakat juga masih kurang pada biro tersebut.

Kata kunci: Fungsi BPD, Penyaluran Aspirasi Masyarakat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamkan, Desa Kepuharjo telah ada, jauh sebelum Indonesia terbentuk, Desa Kepuharjo berfungsi sebagai pemerintahan awal negara sekaligus sebagai wadah masyarakat sosial. Desa Kepuharjo merupakan sebagian besar wilayah Indonesia, padahal Indonesia didirikan di desa ini. Jika dibandingkan dengan jumlah desa di kota dan desa di Kepuharjo, terlihat bahwa jumlah desa di Kepuharjo lebih banyak dibandingkan jumlah desa di kota.

Sekitar 500 kota dijadikan sebagai ibu kota provinsi, kotamadya, dan kabupaten, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 74.093 Desa Kepuharjo. Peraturan terkait Desa Kepuharjo yang ada saat ini sudah dirancang secara spesifik, dan disahkannya UU. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memperkuat bahwa Desa Kepuharjo sekarang menjadi pemerintahan komunitas, menggabungkan fungsi pemerintahan mandiri lokal dan komunitas pemerintahan mandiri. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pembangunan berupaya mencapai masyarakat adil dan sukses dengan pemerataan sumber daya dan spiritualitas.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 memuat syarat tambahan bagi pengembangan Desa Kepuharjo. Desa Kepuharjo dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kesejahteraan manusia dan pengembangan pribadi

anggota masyarakat selalu diutamakan dalam pembangunan Desa Kepuharjo yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan dalam pelaksanaannya.

Aksesibilitas infrastruktur merupakan salah satu alat pembangunan penting yang harus ditawarkan pemerintah karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan harus dipenuhi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan, seperti selesainya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, dapat menjadi indikasi efektifitas otonomi daerah karena keberhasilan suatu pembangunan bergantung pada keberhasilan suatu rencana.

Pemerintah Desa Kepuharjo masih berupaya meningkatkan pelayanan publik yang kurang termanfaatkan dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi sarana mobilitas utama masyarakat merupakan program yang paling diperhatikan oleh Pemerintah Desa Kepuharjo Kariango.

Diharapkan mampu memenuhi kebutuhan prasarana mendasar di Desa Kepuharjoan, tingkat rumah tangga akan mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Aparat Desa Kepuharjo yang berperan sebagai badan organisasi Pemerintah Desa Kepuharjo membantu BPD dalam melaksanakan pembangunan Desa Kepuharjo. Karena infrastruktur merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan pembangunan, maka Pemerintah Desa Kepuharjo kini menjadikan permasalahan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pembangunan infrastruktur Desa Kepuharjo adalah, BPD yang berfungsi sebagai badan pengawasan perangkat daerah, tidak menjalankan fungsinya secara maksimal, BPD umumnya hanya mengikuti program yang disediakan pemerintah Desa Kepuharjo, hal ini menjadikan tidak teraturnya tata pemerintahan Desa Kepuharjo khususnya dalam *membekap* aspirasi masyarakat Desa Kepuharjo. Dari permasalahan tersebut lah maka peneliti ingin mengkaji terkait “**Fungsi Badan Permusyawaratan Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Kepuharjo**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja fungsi badan permusyawaratan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kepuharjo?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat fungsi badan permusyawaratan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kepuharjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi badan permusyawaratan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kepuharjo
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat fungsi badan permusyawaratan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kepuharjo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sumber ilmu pengetahuan terkait fungsi badan permusyawaratan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kepuharjo
2. Sebagai literatur bagi siswa yang tertarik untuk meneliti terkait judul yang sama

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarjidan, Muh. 2017. *Infrastruktur Sebagai Landasan Pembangunan*. Bandung: Intan Pariwara
- Awalludin, Hourulah. 2018. Fungsi Manajemen Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat di Desa Kepuharjo Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggal. *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 3 Nomor 2. Diakses Tanggal 17 Juli 2023
- Kodoatie, R.J. 2015. *Public Policy and Government*. USA: American Public Works Assocation Publisher (APWS Publisher)
- Mifta Thoha. 2012. *Desa Kepuharjo dan Keanekaragaman Bentuk Politik Nya*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Miles, dkk. 2014. *“Qualitative Data Analysis”*. London. SAGE Publications, inc
- Moleong. 2017. *Kualitatif Method*. L.A: Macmillan Publisher
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif
- Sarlito. 2015. *Peran Sebagai Dasar Landasan Tugas*. Medan: Bagus Budaya
- Siagian, P Sondang. 2017. *Peran sebagai aspek sosial*. Surabaya: Buana Permai
- Sihombing, Putra. 2019. Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Kepuharjo Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Sosial Ekonomi*. Volume 2 Nomor 7. Diakses Tanggal 17 Juli 2023
- Soekanto. 2012. *Definisi Struktural Pembagian Peran Pemerintah Desa Kepuharjo*. Jakarta: Media Aksara
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sunarti, Arisna. 2018. Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kepuharjo (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kepuharjo. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 2 Nomor 1. Diakses Tanggal 17 Juli 2023
- Taliziduhu, Muhammad. 2014. Strategi Peningkatan Pendapatan Desa. *Jurnal Ilmu Tata Negara*. Volume 4 Nomor 3. Diakses Tanggal 17 Juli 2023
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zainal, Nining Has. 2008. *Pekembangan Penjabaran Ilmu Sosial*. Jakarta: Cv Pustaka Pelajar